

STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PARTAI DALAM MENGHIMPUN ASPIRASI MASYARAKAT

POLITICAL COMMUNICATION STRATEGIES OF POLITICAL IN COLLECTING PUBLIC ASPIRATIONS

**Kms. Umar Jayanegara¹, Intan Putri^{2*}, Riko Fardiansyah³, Agus Srimudin⁴, Novasriandy⁵,
Mutiar Hikmawati⁶**

^{1,2,3,4,5,6} Prodi Ilmu Komunikasi/Universitas Sumatera Selatan

*Email Correspondence: intanputri@uss.ac.id

Received: 15-03-2026 | Revised: 25-03-2026 | Accepted: 05-04-2026 | Published: 13-04-2026

Abstract

The development of digital technology has brought significant changes to political communication practices, particularly in the way political parties interact with the public. Social media is no longer used solely as a channel for disseminating information but has also become a dialogical space for collecting public aspirations in a more participatory manner. In the context of South Sumatra, complex social conditions and relatively low levels of political participation require political parties to implement communication strategies that are more inclusive and responsive. This study aims to analyze the political communication strategies employed by the South Sumatra Regional Executive Board (DPD) of the Golkar Party in gathering public aspirations. This study adopts a qualitative approach with a descriptive research design. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation studies. Informants were selected using purposive sampling and included core party officials, communication teams or social media administrators, as well as community representatives who had interacted with the party's communication programs. Data analysis was conducted descriptively by applying source and method triangulation to ensure data validity. The findings indicate that the South Sumatra DPD of the Golkar Party implements political communication strategies through the use of social media, the organization of face-to-face dialogue forums, and community-oriented social activities. These strategies contribute to building two-way communication, strengthening relationships with the public, and serving as effective mechanisms for collecting public aspirations. However, the study also identifies challenges related to limited public media literacy and the need to enhance the communication capacities of party officials. The study concludes that inclusive, dialogical, and locally adaptive political communication strategies can improve the effectiveness of public aspiration collection and strengthen the representative function of political parties at the regional level.

Keywords: *Political Communication, Communication Strategy, Political Parties, Public Aspirations*

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam praktik komunikasi politik, khususnya dalam cara partai politik berinteraksi dengan masyarakat. Media sosial tidak hanya dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai ruang dialog untuk menghimpun aspirasi publik secara lebih partisipatif. Dalam konteks Sumatera Selatan, kondisi sosial yang kompleks serta tingkat partisipasi politik masyarakat yang relatif rendah menuntut partai politik untuk menerapkan strategi komunikasi yang lebih inklusif dan responsif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi politik yang diterapkan oleh DPD Partai Golkar Sumatera Selatan dalam menghimpun aspirasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian dipilih secara purposive, meliputi pengurus inti partai, tim komunikasi atau pengelola media sosial, serta perwakilan masyarakat yang pernah berinteraksi dengan program komunikasi partai. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode untuk menjaga keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPD Partai Golkar Sumatera Selatan menerapkan strategi komunikasi politik melalui pemanfaatan media sosial, penyelenggaraan forum dialog tatap muka, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Strategi tersebut berperan dalam membangun komunikasi dua arah, meningkatkan kedekatan dengan masyarakat, serta menjadi sarana efektif dalam penghimpunan aspirasi publik. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan berupa keterbatasan literasi media masyarakat dan perlunya peningkatan kapasitas komunikasi pengurus partai. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa strategi komunikasi politik yang inklusif, dialogis, dan adaptif

terhadap isu lokal mampu meningkatkan efektivitas penghimpunan aspirasi masyarakat serta memperkuat fungsi representasi partai politik di tingkat daerah.

Kata kunci: *Komunikasi Politik, Strategi Komunikasi, Partai Politik, Aspirasi Masyarakat*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam praktik komunikasi politik, khususnya dalam cara partai politik berinteraksi dengan masyarakat. Media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan WhatsApp kini berfungsi sebagai ruang publik baru yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat, luas, dan interaktif (Castells, 2012; McNair, 2018). Kondisi ini menuntut partai politik untuk tidak hanya berperan sebagai penyampai pesan politik, tetapi juga sebagai fasilitator dialog yang mampu menghimpun dan mengartikulasikan aspirasi masyarakat secara efektif. Relevansi isu ini semakin menguat dengan meningkatnya penetrasi internet di tingkat lokal. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa pada tahun 2023 sekitar 70% masyarakat Sumatera Selatan telah mengakses internet secara rutin, yang mengindikasikan potensi besar bagi pengembangan komunikasi politik dua arah antara partai dan publik (APJII, 2023).

Sejumlah studi sebelumnya menegaskan bahwa media digital telah menjadi instrumen strategis bagi partai politik dalam meningkatkan visibilitas, membangun citra, dan menjangkau pemilih secara lebih luas (Stromer-Galley, 2014; Lilleker & Jackson, 2019). Namun, pemanfaatan media sosial oleh partai politik masih cenderung berorientasi pada penyampaian informasi dan kepentingan elektoral, sementara fungsinya sebagai sarana penghimpunan aspirasi masyarakat belum sepenuhnya dijalankan secara sistematis dan berkelanjutan (Vaccari, 2017). Padahal, fitur-fitur interaktif media sosial seperti kolom komentar, pesan langsung, polling, dan survei daring memungkinkan partai politik untuk mengidentifikasi kebutuhan, keluhan, dan harapan masyarakat secara *real-time* serta melakukan segmentasi komunikasi berdasarkan karakteristik audiens tertentu. Pendekatan ini berpotensi mendorong terciptanya komunikasi politik yang lebih partisipatif dan responsif.

Dalam konteks Sumatera Selatan, efektivitas strategi komunikasi politik juga sangat dipengaruhi oleh pemahaman terhadap kondisi sosial dan isu-isu lokal yang dihadapi masyarakat. Wilayah ini dihadapkan pada berbagai persoalan krusial, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan, yang memerlukan perhatian serius dari partai politik. Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Selatan mencatat bahwa tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 mencapai 6,5%, yang menunjukkan perlunya intervensi melalui program-program yang responsif dan didukung oleh komunikasi politik yang efektif (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Selatan, 2022). Dalam situasi ini, partai politik dituntut untuk mengembangkan strategi komunikasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga dialogis melalui forum konsultasi, dialog publik, dan kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Meskipun kajian komunikasi politik telah berkembang, sebagian besar penelitian masih berfokus pada kampanye politik, pemasaran politik, dan komunikasi elektoral di tingkat nasional. Penelitian yang secara khusus mengkaji strategi komunikasi politik partai dalam menghimpun aspirasi masyarakat secara partisipatif di tingkat organisasi partai daerah masih relatif terbatas. Selain itu, rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat Sumatera Selatan, yang menurut data Badan Pusat Statistik hanya mencapai sekitar 55% pada tahun 2022, menunjukkan adanya jarak komunikasi antara partai politik dan publik (BPS, 2022). Kondisi ini mempertegas adanya celah penelitian terkait bagaimana strategi komunikasi politik dapat

berkontribusi dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dan memperkuat fungsi representasi partai di tingkat lokal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi politik yang diterapkan oleh DPD Partai Golkar Sumatera Selatan dalam menghimpun aspirasi masyarakat. Fokus penelitian diarahkan pada bentuk-bentuk komunikasi yang digunakan, baik melalui pendekatan tatap muka maupun pemanfaatan media digital, serta pada bagaimana strategi tersebut mendorong terciptanya komunikasi dua arah yang partisipatif. Penelitian ini berpijak pada asumsi bahwa strategi komunikasi politik yang inklusif, kontekstual, dan responsif terhadap isu lokal mampu meningkatkan efektivitas penghimpunan aspirasi sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap partai politik. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian komunikasi politik dengan menghadirkan perspektif empiris mengenai praktik komunikasi partai politik di tingkat daerah dalam era demokrasi digital. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi partai politik dalam merancang strategi komunikasi yang lebih adaptif dan berorientasi pada aspirasi publik. Selain itu, secara kebijakan, studi ini berkontribusi dalam mendorong penguatan demokrasi partisipatif melalui optimalisasi peran komunikasi politik sebagai jembatan antara masyarakat dan institusi politik.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu didefinisikan sebagai kumpulan kajian ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya dan memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian yang sedang dikaji. Menurut Creswell (2014), penelitian terdahulu berfungsi sebagai dasar konseptual dan empiris yang membantu peneliti memahami perkembangan teori, temuan utama, serta pendekatan metodologis yang telah digunakan dalam suatu bidang studi. Dengan menelaah penelitian sebelumnya, peneliti dapat memetakan posisi penelitian yang akan dilakukan dalam kerangka keilmuan yang lebih luas. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini antara lain: pertama penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Anwar tahun 2015 dengan judul penelitian “Strategi Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera dalam Meningkatkan Elektabilitas Pada Pilkada 2015 di Kota Samarinda” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi politik yang dijalankan telah berlangsung secara optimal, meskipun efektivitasnya tetap dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan keyakinan masyarakat terhadap pesan yang disampaikan. Partai Keadilan Sejahtera menerapkan berbagai bentuk kegiatan komunikasi politik serta memanfaatkan beragam media massa, seperti radio, televisi, dan surat kabar, sebagai sarana penyiaran pesan persuasif. Seluruh program tersebut dirancang dengan tujuan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Partai Keadilan Sejahtera, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan elektabilitas partai di tingkat lokal.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Asy Syuaramusdalifah dan Zulfahmi Yasir Yunan pada tahun 2022 dengan judul penelitian “Komunikasi Politik dalam Menampung Aspirasi Masyarakat” adapun hasil penelitian yaitu Komunikasi politik memiliki implikasi yang signifikan terhadap aktivitas dan partisipasi politik masyarakat. Perilaku serta aktivitas politik berkaitan erat dengan proses pembentukan dan penyaluran aspirasi publik, mengingat tindakan politik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat umumnya muncul dari kesadaran kolektif yang terwujud dalam aspirasi bersama. Dalam konteks pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memegang peran strategis sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat. Keberadaan BPD memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat Desa

Panggunharjo untuk menyampaikan aspirasi melalui mekanisme musyawarah dan mufakat, yang selanjutnya diteruskan kepada pemerintah desa agar aspirasi tersebut dapat direalisasikan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi politik memiliki peran strategis dalam membentuk partisipasi, aspirasi, dan perilaku politik masyarakat. Penelitian pertama menunjukkan bahwa strategi komunikasi politik yang dirancang secara sistematis dan didukung oleh pemanfaatan berbagai media massa mampu meningkatkan elektabilitas partai politik, dengan catatan bahwa efektivitas komunikasi sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan keyakinan masyarakat terhadap pesan politik yang disampaikan. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan strategi komunikasi politik tidak hanya bergantung pada intensitas penyampaian pesan, tetapi juga pada penerimaan dan kepercayaan public. Secara keseluruhan, penelitian terdahulu tersebut mengindikasikan bahwa komunikasi politik yang efektif harus bersifat partisipatif, dialogis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Baik dalam konteks partai politik maupun lembaga perwakilan di tingkat lokal, komunikasi politik berfungsi tidak hanya sebagai sarana penyampaian pesan, tetapi juga sebagai alat strategis untuk membangun keterlibatan, kepercayaan, dan penyaluran aspirasi masyarakat secara berkelanjutan.

Strategi Komunikasi Politik

Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan yang memiliki dampak langsung terhadap berbagai aktivitas politik (Cangara, 2016). Melalui komunikasi politik, seluruh unsur dalam sistem politik, termasuk partai politik, dapat saling terhubung sehingga pesan, aspirasi, dan kepentingan masyarakat yang disampaikan dapat diolah dan diwujudkan dalam bentuk kebijakan. Oleh karena itu, komunikasi politik tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan harus dikaji dalam keterkaitannya dengan dinamika politik beserta berbagai persoalan yang menyertainya. Strategi komunikasi politik dapat dipahami sebagai serangkaian upaya atau pendekatan yang dirancang untuk mencapai tujuan politik melalui penyampaian pesan-pesan politik guna memengaruhi sikap, perilaku, serta tindakan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai media. Anwar Arifin (2011:236) menyatakan bahwa strategi komunikasi politik merupakan keseluruhan keputusan bersifat kondisional yang dirumuskan dan dilaksanakan pada masa kini sebagai langkah untuk mencapai tujuan politik di masa mendatang. Dengan demikian, strategi komunikasi politik menjadi kerangka perencanaan yang menentukan bagaimana pesan politik disusun dan disampaikan secara efektif agar mampu menarik perhatian serta dukungan khalayak yang berpotensi menjadi pendukung politik.

Partai Politik

Partai politik merupakan organisasi yang terdiri atas sekelompok individu yang terstruktur secara permanen dan bertujuan untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi para pemimpinnya. Melalui penguasaan tersebut, partai politik berupaya memberikan berbagai keuntungan, baik yang bersifat ideologis maupun material, kepada para anggotanya (Budiardjo, 2008:404). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, partai politik memiliki sejumlah fungsi utama dalam kehidupan demokrasi. Pertama, partai politik berperan sebagai sarana pendidikan politik, baik bagi anggotanya maupun masyarakat luas, guna membentuk warga negara yang memiliki kesadaran terhadap hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, partai politik berfungsi menciptakan iklim yang kondusif melalui penyusunan program-program nyata, sekaligus menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, partai politik menjalankan fungsi sebagai wahana untuk menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat secara

konstitusional dalam proses perumusan dan penetapan kebijakan negara. Keempat, partai politik mendorong dan memfasilitasi partisipasi politik warga negara. Kelima, partai politik berperan dalam proses rekrutmen politik, khususnya dalam pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokratis dengan tetap memperhatikan prinsip kesetaraan gender.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi komunikasi politik yang diterapkan oleh DPD Partai Golkar Sumatera Selatan dalam menghimpun aspirasi masyarakat, serta konteks sosial dan politik yang melingkupinya. Pengambilan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Informan penelitian terdiri atas pengurus inti DPD Partai Golkar Sumatera Selatan, pengelola media sosial atau tim komunikasi partai, serta perwakilan masyarakat yang pernah terlibat atau berinteraksi langsung dengan program komunikasi partai. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan fokus penelitian, meliputi strategi komunikasi yang digunakan, pemanfaatan media digital, serta mekanisme penghimpunan dan pengelolaan aspirasi masyarakat. Observasi dilakukan terhadap aktivitas komunikasi politik partai, baik dalam kegiatan tatap muka maupun melalui platform media sosial resmi DPD Partai Golkar Sumatera Selatan. Sementara itu, studi dokumentasi mencakup analisis terhadap dokumen internal partai, konten media sosial, laporan kegiatan, serta arsip terkait program komunikasi politik. Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara, lembar observasi, dan daftar dokumentasi. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan dan teknik pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya adalah Teori Komunikasi Politik dari Dan Nimmo. Nimmo menekankan bahwa komunikasi politik tidak sekadar proses penyampaian informasi mengenai isu atau kebijakan politik, tetapi mencakup bagaimana pesan tersebut dibentuk, siapa yang menjadi komunikatornya, melalui saluran apa pesan disampaikan, serta bagaimana audiens menafsirkan dan memberikan respons terhadap pesan tersebut. Menurut Nimmo, komunikasi politik merupakan aktivitas yang dilakukan aktor politik seperti partai politik, pemimpin, maupun organisasi politik untuk menyampaikan pesan-pesan yang memiliki muatan politik kepada masyarakat. Tujuannya adalah memengaruhi pengetahuan publik mengenai isu tertentu, membentuk atau mengubah sikap politik mereka, serta mendorong munculnya perilaku politik yang sesuai dengan kepentingan aktor tersebut. Dengan kata lain, komunikasi politik bukan hanya transfer informasi, tetapi juga proses memengaruhi dan membentuk opini publik.

Dalam konteks penelitian di DPD Partai Golkar Sumatera Selatan, teori Nimmo sangat relevan untuk menjelaskan bagaimana partai mengelola pesan politik, memilih juru bicara atau komunikator yang tepat, menentukan saluran komunikasi seperti media digital, tatap muka, maupun kegiatan politik, serta mengamati bagaimana masyarakat memberikan tanggapan melalui aspirasi, komentar, maupun partisipasi dalam kegiatan publik. Pendekatan ini membantu memahami bahwa setiap strategi komunikasi yang dijalankan partai memiliki tujuan tertentu dalam membentuk persepsi dan keterlibatan politik masyarakat.

Dalam kerangka teori komunikasi politik yang dikemukakan Dan Nimmo, terdapat tiga komponen utama yang menjadi fokus dalam memahami proses komunikasi politik, yaitu:

1. Komunikator Politik (*Political Communicators*)

Komunikator politik merupakan actor, baik individu maupun kelompok yang memiliki peran utama dalam menyampaikan pesan politik kepada publik. Mereka dapat berasal dari berbagai elemen, seperti pengurus partai, tokoh masyarakat, calon legislatif, juru bicara, hingga lembaga politik sebagai institusi yang memiliki kewenangan menyebarkan informasi. Keberadaan komunikator sangat krusial karena mereka menjadi sumber utama konstruksi pesan, menentukan gaya komunikasi yang digunakan, serta merancang strategi penyampaian agar pesan politik dapat diterima dan dipahami oleh khalayak secara efektif. Komunikator tidak hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga membangun citra, mengelola opini publik, dan menciptakan hubungan yang bersifat persuasif dengan masyarakat. Cara komunikator membawa pesan, baik melalui bahasa, gestur, maupun pilihan media akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana masyarakat menilai kredibilitas dan tujuan politik dari pihak yang diwakilinya.

Komunikator politik juga memiliki tanggung jawab untuk menyesuaikan pesan yang disampaikan dengan karakteristik audiens, situasi politik yang sedang berkembang, serta jenis media yang digunakan. Penyesuaian ini penting agar pesan dapat diterima secara tepat, tidak menimbulkan kesalahpahaman, dan mampu menjawab kebutuhan informasi masyarakat. Selain itu, komunikator dituntut memiliki kemampuan komunikasi yang baik, mulai dari kemampuan verbal, penyusunan narasi, hingga pemahaman konteks sosial-politik. Mereka juga harus mampu membangun citra positif melalui konsistensi perilaku dan pesan yang disampaikan. Kredibilitas komunikator menjadi faktor kunci dalam menentukan sejauh mana pesan politik dapat dipercaya dan memengaruhi opini publik. Semakin tinggi tingkat kepercayaan terhadap komunikator, semakin besar pula peluang pesan diterima dan berdampak pada sikap politik masyarakat. Di DPD Partai Golkar Sumatera Selatan, aktor-aktor yang berperan sebagai komunikator politik meliputi pengurus harian partai, anggota dewan dari Fraksi Golkar, serta staf bidang komunikasi dan media. Mereka secara aktif menjalankan komunikasi politik melalui berbagai aktivitas, seperti dialog publik, kunjungan lapangan, agenda reses, hingga penyebaran informasi melalui media digital.

2. Pesan Politik (*Political Messages*)

Pesan politik merupakan segala bentuk informasi, gagasan, atau simbol yang disampaikan partai kepada masyarakat sebagai upaya mengomunikasikan identitas, program, serta orientasi politiknya. Pesan tersebut dapat berisi penjelasan mengenai program kerja, laporan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat, sikap partai terhadap isu-isu aktual, maupun upaya membangun citra positif di mata publik. Agar mampu memengaruhi persepsi dan perilaku politik masyarakat, penyusunan pesan politik harus dilakukan secara sistematis jelas, fokus, dan selaras dengan tujuan strategis partai sehingga pesan yang disampaikan bukan hanya informatif, tetapi juga relevan, mudah dipahami, dan mampu memperkuat hubungan antara partai dan konstituen.

Pesan politik merupakan inti dari proses komunikasi yang disampaikan partai kepada publik, yang dapat berupa gagasan, informasi faktual, ajakan, maupun simbol-simbol politik yang merepresentasikan identitas dan nilai yang ingin dibangun oleh partai. Pesan tersebut mencakup beragam aspek, seperti penjelasan mengenai program kerja partai, hasil pengolahan aspirasi masyarakat yang telah dihimpun melalui berbagai kegiatan, pernyataan sikap atau posisi partai terhadap isu-isu sosial dan politik yang sedang berkembang, hingga upaya strategis dalam memperkuat citra positif di mata masyarakat. Agar pesan politik dapat diterima dengan baik dan memiliki pengaruh yang signifikan, penyusunannya harus dilakukan secara

terstruktur, jelas, dan relevan dengan kebutuhan publik serta kondisi politik yang sedang berlangsung. Dalam penyampaianya, pesan politik dapat dituangkan melalui beragam media dan aktivitas, seperti materi publikasi cetak, unggahan di media sosial, pidato pejabat partai, dialog publik, kegiatan reses, maupun kampanye politik. Setiap bentuk pesan dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik audiens dan media yang digunakan agar dapat menjangkau khalayak secara optimal. Pesan politik merupakan keseluruhan isi komunikasi yang disampaikan partai kepada masyarakat, yang dapat berwujud gagasan, informasi, instruksi, maupun simbol-simbol politik yang ingin diperkuat untuk membangun identitas partai di hadapan publik. Di dalamnya terkandung berbagai elemen penting, seperti penjabaran program kerja, penjelasan mengenai hasil pengelolaan aspirasi masyarakat, pernyataan sikap partai terhadap isu sosial dan politik, hingga upaya strategis dalam membentuk citra positif dan meningkatkan kepercayaan publik. Agar mampu memengaruhi persepsi dan respons masyarakat secara efektif, pesan politik harus dikonstruksi secara sistematis, jelas, terarah, serta disesuaikan dengan tujuan komunikasi yang ingin dicapai oleh partai.

3. Khalayak Politik (*Political Public*)

Khalayak politik merupakan kelompok masyarakat yang menjadi tujuan atau sasaran dari proses komunikasi politik. Mereka dapat terdiri dari berbagai segmen, seperti pemilih umum, pendukung partai, komunitas lokal, kelompok kepentingan tertentu, maupun masyarakat luas yang memiliki potensi untuk memberikan aspirasi, tanggapan, atau dukungan politik. Dalam pandangan Dan Nimmo, khalayak politik bukanlah pihak yang pasif; mereka aktif menafsirkan pesan, merespons informasi yang diterima, serta memberikan umpan balik yang dapat memengaruhi strategi komunikasi yang dilakukan aktor politik di tahap selanjutnya. Khalayak dapat menerima, menolak, atau menegosiasikan makna dari pesan politik yang diterima, sehingga respons mereka menjadi salah satu indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas komunikasi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai karakteristik khalayak menjadi faktor kunci dalam menentukan bagaimana pesan seharusnya disusun dan media apa yang paling tepat digunakan. Di DPD Partai Golkar Sumatera Selatan strategi komunikasi politik dirancang, dijalankan, dan dievaluasi oleh partai dalam rangka menghimpun aspirasi masyarakat. Melalui berbagai aktivitas kelembagaan, seperti pengelolaan media digital, dialog publik, kunjungan lapangan, hingga kegiatan reses anggota dewan, dapat memahami bahwa komunikasi politik tidak hanya sebatas penyampaian informasi, tetapi merupakan proses strategis yang melibatkan perumusan pesan, pemilihan media, dan pengelolaan hubungan dengan masyarakat. DPD Partai Golkar Sumatera Selatan menjalankan komunikasi politik secara terstruktur untuk memperkuat kedekatan dengan publik, membangun citra partai, serta merespons kebutuhan dan harapan masyarakat secara berkelanjutan.

Strategi Penggunaan Media Sosial

Penggunaan media sosial oleh DPD Partai Golkar Sumatera Selatan menjadi salah satu strategi komunikasi politik yang sangat penting dan adaptif dalam era digital saat ini. Media sosial tidak hanya dimanfaatkan sebagai sarana penyebaran informasi mengenai kegiatan dan program partai, tetapi juga berfungsi sebagai wadah interaksi langsung antara partai dan masyarakat. Melalui platform seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp, partai dapat membangun kedekatan dengan publik, memperkuat citra, serta membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara cepat dan mudah. Temuan Pew Research Center (2021) menunjukkan bahwa sekitar 79% orang dewasa di Indonesia aktif menggunakan media sosial, sehingga kanal digital ini memberikan peluang besar bagi aktor politik untuk memperluas jangkauan komunikasi, menjangkau segmen pemilih muda, serta menciptakan komunikasi dua arah yang lebih responsif dan partisipatif. Dalam konteks ini, strategi digital DPD Partai Golkar Sumatera Selatan

menjadi instrumen yang sangat relevan untuk memperkuat hubungan politik sekaligus meningkatkan efektivitas penghimpunan aspirasi masyarakat.

Penggunaan media sosial oleh DPD Partai Golkar Sumatera Selatan menjadi salah satu strategi komunikasi politik yang semakin penting di era digital saat ini. Media sosial tidak hanya dimanfaatkan sebagai ruang untuk menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan partai, tetapi juga berfungsi sebagai sarana interaktif yang memungkinkan terbangunnya hubungan yang lebih dekat dan dinamis dengan masyarakat. Di tengah tingginya tingkat penggunaan media sosial oleh masyarakat Indonesia yang menurut riset Pew Research Center (2021) mencapai 79% pengguna dewasa platform digital memberikan peluang besar bagi partai politik untuk memperluas jangkauan pesan politik, mempercepat arus komunikasi dua arah, dan memperoleh aspirasi publik secara lebih efisien. Strategi ini sejalan dengan kebutuhan partai untuk tetap adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi serta mengikuti pola komunikasi masyarakat modern yang semakin mengandalkan media digital sebagai sumber informasi dan ruang partisipasi politik.



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2026

Gambar 1. Akun Instagram DPD Partai Golkar Sumsel

Namun, dalam praktiknya, penggunaan media sosial sebagai saluran komunikasi politik juga menghadirkan sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi. Salah satu hambatan terbesar adalah maraknya penyebaran informasi keliru atau hoaks yang berpotensi membentuk persepsi negatif masyarakat terhadap partai politik. Kondisi ini menuntut DPD Partai Golkar Sumatera Selatan untuk tidak hanya aktif dalam menyampaikan pesan politik, tetapi juga mengambil peran dalam membangun literasi media di tengah masyarakat, agar publik mampu memilah informasi yang valid dan yang menyesatkan. Tantangan tersebut semakin relevan jika melihat laporan Kominfo (2023) yang mengungkapkan bahwa sekitar 60% masyarakat masih mengalami kesulitan dalam menilai keaslian dan akurasi informasi yang beredar di media sosial. Dengan demikian, upaya edukasi, klarifikasi informasi, serta penyampaian konten yang transparan dan berbasis fakta menjadi langkah penting dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus melindungi integritas komunikasi politik partai.

Forum Dialog Sebagai Sarana Aspirasi

Forum dialog yang diselenggarakan oleh DPD Partai Golkar Sumatera Selatan menjadi salah satu sarana komunikasi tatap muka yang paling efektif dalam menghimpun dan memahami aspirasi masyarakat. Pada setiap pelaksanaan forum, pengurus partai tidak hanya berperan sebagai pendengar, tetapi juga memberikan tanggapan langsung terhadap permasalahan, usulan, ataupun kritik yang disampaikan peserta. Interaksi dua arah ini menciptakan suasana yang lebih terbuka sehingga masyarakat merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses politik. Efektivitas forum tersebut juga tercermin dari temuan Lembaga Survei

Indonesia (2023), yang melaporkan bahwa 75% peserta kegiatan dialog menyatakan bahwa pendapat mereka dianggap penting dan ditindaklanjuti oleh pengurus. Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme komunikasi tatap muka mampu memperkuat rasa kepercayaan dan kedekatan masyarakat dengan partai, sekaligus menjadi instrumen strategis dalam proses penjangkaran aspirasi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Forum dialog yang diselenggarakan oleh DPD Partai Golkar Sumatera Selatan memberikan bukti konkret mengenai efektivitas komunikasi politik berbasis tatap muka dalam menghimpun aspirasi masyarakat. Salah satu contoh yang menonjol terjadi ketika DPD Partai Golkar mengadakan dialog terbuka di Kabupaten Ogan Ilir. Pada kegiatan tersebut, warga secara langsung menyampaikan berbagai keluhan, salah satunya mengenai kondisi infrastruktur jalan yang dinilai sudah tidak layak dan menghambat aktivitas ekonomi maupun mobilitas harian mereka. Menanggapi hal tersebut, pengurus partai tidak hanya mendengarkan, tetapi juga menyatakan komitmen untuk memperjuangkan perbaikan jalan tersebut melalui jalur politik dan kebijakan yang tersedia. Respons cepat dan sikap proaktif tersebut meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap partai, sekaligus memperkuat persepsi bahwa Partai Golkar benar-benar menjalankan fungsi representatifnya sebagai penyalur aspirasi rakyat. Dengan demikian, forum dialog tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga ruang konsolidasi kepercayaan publik dan penguatan citra partai sebagai aktor politik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Keberhasilan forum dialog yang diselenggarakan oleh DPD Partai Golkar Sumatera Selatan sangat dipengaruhi oleh kapasitas para pengurus dalam menyampaikan informasi secara jelas, sistematis, dan transparan kepada masyarakat. Dalam praktiknya, beberapa peserta forum terkadang merasa kurang puas karena jawaban yang diberikan belum sepenuhnya menjawab pertanyaan atau keluhan yang mereka ajukan. Situasi ini menunjukkan bahwa efektivitas forum bukan hanya bergantung pada antusiasme masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, tetapi juga pada kemampuan komunikatif para pengurus partai sebagai fasilitator dialog. Oleh karena itu, penting bagi DPD Partai Golkar untuk meningkatkan kompetensi pengurus dalam hal komunikasi publik, terutama dalam keterampilan menjelaskan isu-isu kebijakan, memberikan klarifikasi, serta melakukan negosiasi secara persuasif. Pelatihan komunikasi ini akan membantu pengurus memberikan respons yang lebih komprehensif dan meyakinkan, sehingga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat serta menjaga keberlangsungan forum sebagai sarana efektif penghimpunan aspirasi.

Kegiatan Sosial dan Citra Partai

Kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh DPD Partai Golkar Sumatera Selatan tidak hanya bertujuan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dari strategi komunikasi politik untuk memperkuat citra positif partai di mata publik. Melalui berbagai program seperti bakti sosial, penyuluhan kesehatan, pemberian bantuan sembako, serta kegiatan pelayanan masyarakat lainnya, partai berupaya menunjukkan komitmen nyata dalam meningkatkan kesejahteraan warga. Aktivitas-aktivitas ini menciptakan ruang interaksi langsung antara pengurus partai dan masyarakat, sehingga membangun kedekatan emosional serta menumbuhkan rasa percaya dan simpati. Data dari Kementerian Sosial (2023) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial yang diprakarsai oleh partai politik mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun-tahun terakhir, dan Partai Golkar tercatat sebagai salah satu partai yang paling aktif dalam melaksanakan program-program sosial tersebut. Fakta ini memperlihatkan bahwa pendekatan sosial tidak hanya memberikan dampak kemanusiaan, tetapi juga

menjadi sarana strategis dalam memperluas dukungan politik sekaligus memperkuat hubungan antara partai dan konstituen.

Salah satu contoh kegiatan sosial yang dinilai sangat berhasil adalah program penyuluhan kesehatan yang dilaksanakan di Desa Tanjung Raja. Pada kegiatan tersebut, DPD Partai Golkar Sumatera Selatan menjalin kerja sama dengan dinas kesehatan setempat untuk menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis, edukasi mengenai pola hidup sehat, serta konsultasi medis bagi masyarakat. Program ini mendapatkan respons yang sangat positif karena mampu menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Sumatera Selatan (2023), sebanyak 85% peserta mengaku merasa terbantu dan memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif tersebut. Selain memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, kegiatan ini turut memperkuat citra positif Partai Golkar sebagai organisasi politik yang hadir secara nyata dalam menjawab kebutuhan sosial masyarakat serta menunjukkan komitmen mereka terhadap peningkatan kualitas hidup warga.

Namun, tantangan yang dihadapi adalah memastikan keberlanjutan dari kegiatan sosial tersebut. Masyarakat pada umumnya berharap bahwa program-program sosial yang dilaksanakan oleh partai politik tidak hanya muncul menjelang momentum tertentu atau berlangsung secara sesekali, tetapi hadir sebagai upaya yang konsisten dan berkesinambungan. Harapan ini menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan bentuk kepedulian yang lebih terstruktur dan berjangka panjang agar manfaat yang diterima tidak bersifat sementara. Oleh karena itu, DPD Partai Golkar Sumatera Selatan perlu merancang kegiatan sosial yang memiliki kesinambungan, misalnya melalui program rutin tahunan, kerja sama jangka panjang dengan lembaga pemerintah atau swasta, serta penyusunan agenda pemberdayaan masyarakat yang mampu memberikan dampak nyata dan berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas kegiatan sosial, tetapi juga memperkuat kredibilitas dan citra partai sebagai lembaga politik yang benar-benar hadir dan berkomitmen terhadap kebutuhan masyarakat.

Evaluasi dan Rekomendasi

Evaluasi terhadap berbagai strategi komunikasi yang dijalankan oleh DPD Partai Golkar Sumatera Selatan menunjukkan bahwa meskipun implementasinya telah memberikan dampak positif dalam memperkuat hubungan antara partai dan masyarakat, masih terdapat sejumlah aspek yang memerlukan peningkatan. Penggunaan media sosial, pelaksanaan forum dialog, serta kegiatan sosial memang telah menjadi instrumen penting dalam menghimpun aspirasi dan membangun citra partai, namun efektivitas ketiganya perlu ditinjau secara berkala melalui proses evaluasi terstruktur. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap strategi benar-benar mampu menjangkau khalayak sasaran, menyampaikan pesan secara optimal, serta menghasilkan umpan balik yang relevan bagi penyusunan kebijakan partai. Oleh karena itu, salah satu rekomendasi utama adalah perlunya peningkatan kapasitas para pengurus partai, khususnya dalam hal keterampilan komunikasi, pengelolaan media digital, serta kemampuan membangun interaksi dua arah yang responsif dan profesional dengan masyarakat. Dengan peningkatan kapasitas tersebut, strategi komunikasi partai diharapkan dapat berjalan lebih efektif, adaptif, dan selaras dengan dinamika kebutuhan publik.

Evaluasi terhadap strategi komunikasi yang dijalankan oleh DPD Partai Golkar Sumatera Selatan menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya telah memberikan dampak positif, tetap terdapat sejumlah aspek yang memerlukan peningkatan. Setiap saluran komunikasi, baik media sosial, forum dialog, maupun kegiatan sosial perlu dievaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana efektivitasnya dalam

menghimpun aspirasi serta membangun hubungan dengan masyarakat. Melalui evaluasi yang sistematis, partai dapat mengidentifikasi kelemahan, menyesuaikan pendekatan, dan mengembangkan inovasi baru dalam strategi komunikasinya. Salah satu rekomendasi penting adalah peningkatan kapasitas para pengurus dan kader partai dalam keterampilan komunikasi, termasuk kemampuan mendengar aktif, merespons pertanyaan publik dengan tepat, serta mengelola interaksi di ruang digital maupun tatap muka. Peningkatan kapasitas ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas penyampaian pesan politik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi komunikasi politik DPD Partai Golkar Sumatera Selatan dalam menghimpun aspirasi masyarakat dilakukan melalui pemanfaatan media sosial, forum dialog tatap muka, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Ketiga strategi tersebut efektif dalam membangun komunikasi dua arah, meningkatkan kedekatan partai dengan masyarakat, serta memperkuat fungsi partai sebagai penyalur aspirasi publik. Media sosial berperan penting dalam memperluas jangkauan komunikasi dan mempercepat penghimpunan aspirasi, sementara forum dialog dan kegiatan sosial memberikan ruang interaksi yang lebih mendalam dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan berupa keterbatasan literasi media masyarakat dan perlunya peningkatan kapasitas komunikasi pengurus partai agar aspirasi yang dihimpun dapat dikelola dan ditindaklanjuti secara lebih optimal. Secara keseluruhan, strategi komunikasi politik yang inklusif, dialogis, dan responsif terhadap isu lokal terbukti mampu meningkatkan efektivitas penghimpunan aspirasi serta memperkuat peran representatif partai politik di tingkat daerah. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar digunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran guna mengukur dampak strategi komunikasi politik terhadap partisipasi dan kepercayaan masyarakat secara lebih terukur, serta memperluas kajian dengan membandingkan strategi komunikasi antarpolitical politik di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- APJII. (2023). *Laporan Survei Penetrasi Internet Indonesia 2023*.
- APJII. (2023). *Laporan survei penetrasi internet Indonesia tahun 2023*. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.
- Arifin, A. (2011). *Komunikasi Politik: Filsafat, Paradigma, Teori, Tujuan, Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Partisipasi politik masyarakat Provinsi Sumatera Selatan*. BPS Provinsi Sumatera Selatan.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cangara, H. (2016). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Castells, M. (2012). *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age*. Cambridge: Polity Press.
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. (2022). *Data tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022*. Disnakertrans Sumatera Selatan.
- I. Putri, A. I. Mulyadi, S. D. Fajarin, and R. Eriyansyah, "Transformasi Digital UMKM Kota Palembang," *J. Ilmu Komun. Balayudha*, vol. Vol 3 No.1, no. 1, pp. 28–40, 2023.
- I. Putri, N. Syukerti, A. I. Mulyadi, and D. Dendi, "Implementation Of Palembang City Government Programs In Digital Marketing Transformation And Halal Certification," *KOMUNIKA*, vol. 7, no. 1, 2024.

- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023). *Laporan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Sosial Politik*. Jakarta: Kemensos RI.
- Kominfo Republik Indonesia. (2023). *Laporan Literasi Digital Nasional*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
- Lilleker, D. G., & Jackson, N. (2019). *Political Campaigning, Elections and the Internet: Comparing the US, UK, France and Germany*. London: Routledge.
- McNair, B. (2018). *An Introduction to Political Communication* (6th ed.). London: Routledge.
- Nimmo, D. (2004). *Political Communication and Public Opinion in America*. Santa Barbara: ABC-CLIO.
- Norris, P. (2011). *Democratic deficit: Critical citizens revisited*. Cambridge University Press.
- Pew Research Center. (2021). *Social Media Use in Emerging Economies*. Washington, DC: Pew Research Center.
- Putri, I., Dendi, Mulyadi, A. I., Adli, & Triesia, D. (2024). *Implementasi fotografi produk dengan menggunakan kamera smartphone bagi pelaku UMKM*. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(2), 373–382. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i2.21843>
- Putri, N., Syukerti, A. I., Mulyadi, H., Puspita, and M. A. Zuliansyah, “*Optimalisasi Digital Marketing Dalam Pemanfaatan Canva Bagi Pelaku UMKM di 26 Ilir Kota Palembang*,” *J. Pengabd. UntukMu NegeRI*, vol. 8, no. 3, pp. 516–528, 2024
- Stromer-Galley, J. (2014). *Presidential Campaigning in the Internet Age*. Oxford: Oxford University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.
- Vaccari, C. (2017). *Online Mobilization in Comparative Perspective: Digital Appeals and Political Engagement*. *Political Communication*, 34(2), 178–196. <https://doi.org/10.1080/10584609.2017.1334720>